BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2005, rakyat Iran melakukan agenda nasional yakni pemilhan Presiden ke-9. Rakyat Iran kembali menentukan siapa yang berhak memenggang tampuk kekuasaan menggantikan Presiden Mohammad Khatami yang masa jabatannya telah berakhir. Sesuai dengan pasal 114 Konstitusi Republik Islam Iran yang membatasi masa jabatan Presiden hingga dua periode, khatami menjabat sejak 1997.

Setelah melalui dua kali putaran dimana dua kandidat kuat yakni Ali Akbar Rafsanjani dan Mahmoud Ahmadinejad, dimana Rafsanjani memperoleh suara 35,9 % dan Ahmadinejad memperoleh suara 61,6 %, dan kemudian yang terpilih sebagai Presiden Iran adalah Mahmoud Ahmadinejad. Dengan terpilihnya Presiden baru ini, banyak kalangan yang mengkhawatirkan akan munculnya sistem taliban di Iran. Karena sosok Ahmadinejad merupakan wakil dari kelompok konservatif garis keras. Hal tersebut dinilai sangat mempengaruhi stabilitas keamanan di Timur Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Iran tengah mengembangkan program nuklir. Mungkinkah stabilitas keamanan di Timur Tingah akan terganggu dengan terpilihnya presiden Ahmadinejad?

Dari alasan itulah maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "
Pengaruh Terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad Sebagai Presiden Iran Terhadap
Stabilitas Kasmanan di Timur Tengah" Dengan mengangkat judul tersebut

penulis mencoba untuk memprediksikan bagaimana masa depan Iran dengan terpilihnya Ahmadinejad sebagai Presiden Iran, serta wilayah Timur Tengah pada umumnya.

B. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan :

- Untuk memenuhi syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Menjelaskan bagaimana pengaruh terpilihnya Ahmadinejad sebagai
 Presiden Iran terhadap proses perdamaian Di Timur Tengah.
- 3. Mempelajari dan menjelaskan aktor dan perilaku internasional yang ada dalam hubungan internasional dengan ilmu dan pengetahuan yang didapat dibangku perkuliahan dalam rangka pengembangan wawasan dan amplikasi teori yang telah dipelajari oleh penulis selama menempuh pendidikan.

C. Latar Belakang Masalah

Timur Tengah merupakan suatu kawasan yang sangat strategis dan mempunyai beragam keistimewaan. Keistimewaan tersebut antara lain, wilayahnya yang sangat strategis. Dimana Timur Tengah merupakan kawasan yang diapit oleh tiga benua yaitu benua Asia, Afrika dan Eropa. Timur Tengah juga merupakan kawasan penghasil minyak terbesar di dunia. Sekitar 60%

minyak dunia ada di Timur Tengah dan 70% kebutuhan minyak Eropa berasal dari sana. Timur Tengah juga sebagai tempat lahirnya tiga agama besar di dunia, yaitu agama Islam, Agama Yahudi dan Agama Kristen, dimana ketiganya merupakan agama yang dianut oleh banyak orang didunia. Namun demikian dri keistimewan tersebut ada satu keistimewaan yang hingga saat ini masih sering terjadi, yitu kawasan ini merupakan kawasan yang rawan konflik. Dengan adanya minyak yang melimpah di Timur Tengah dan sebagai tempat lahirnya tiga agama besar dunia menjadikan Timur Tengah tidak pernah sepi dari konflik. Selalu saja ada perselisihan antar negara Timur Tengah maupun adanya campur tangan dari pihak asing yang menginginkan minyak yang ada diwilayah tersebut. Sekarang ini ketegangan juga sedang melanda salah satu negara di kawasan tersebut yaitu Iran.

Iran merupakan salah satu negara di Timur Tengah. Negara yang sebelum revolusi dipimpin oleh Reza Shah Pahlevi selama 30 tahun ini merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alamnya. Negara ini mempunyai sumber daya alam berupa gas alam nomer dua terbesar setelah Uni Soviet (Rusia) dan juga mempunyai sumber daya minyak bumi yang sangat berpengaruh dalam percaturan politik internasional. Reza Shah Pahlevi ini meneruskan kekuasaan ayahnya yaitu Reza, dengan otoriter. Namun kekuasaannya tidak bertahan lama, kekuasaannya berakhir pada tanggal 16 September 1941 bertepatan pada permulaan meletusnya Perang Dunia II. Dimana pada saat itu pasukan sekutu Inggris-Rusia menduduki Iran dan kemudian

¹ Ci 11. T. L. 11. C. Vann Monnani Dinamila Darticinasi Dalitik Daramanan Iran Accis I DDI

menobatkan Muhammad Reza Pahlevi yang sering dikenal dengan nama Shah Reza Pahlevi sebagai Sultan kerajaan Iran. Karena ketika itu Shah Reza masih muda, maka dia hanya dijadikan sebagai alat kepanjangan tangan bagi kekuasaan Inggris-Rusia. Setelah PD II berakhir Iran berada dibawah pengaruh Amerika Serikat. Kemudian Shah Reza dipilih berdasarkan konstitusi. Dalam pemerintahannya, Dia mengontrol, mendikte, dan mendominasi semua aparat dan institusi negara, kabinet, parlemen, senat dan partai-partai politik, pejabat pemerintah semuanya bekerja untuk mengabdi dan melayani Shah.

Dengan gaya kepemimpinan Shah yang diktator dan otoriter tersebut maka hal ini menimbulkan polemik didalam negeri Iran. Rakyat Iran menuntut adanya kebebasan yang lebih dalam mengekepresikan kebebasan berpolitiknya serta adanya perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di Iran. Kemudian pada tahun 1979 terjadilah sebuah gerakan revolusioner yang menggulingkan kekuasaan otoriter Shah. Pada revolusi ini sekitar tiga juta rakyat Iran turun ke jalan dalam mobilisasi massa terbesar sepanjang sejarah Iran. Dalam revolusi ini yang menjadi tuntutan utama yang disuarakan oleh rakyat Iran adalah turunnya Shah Reza Pahlevi sebagai penguasa tertinggi di Iran. Dihadapkan dengan sebuah gerakan massa dengan skala yang sangat besar, Shah beserta kaki tangannya yang selama ini berkuasa dengan sangat otoriter dalam menindas rakyat Iran ternyata dapat ditumbangkan dengan kekuatan 'aksi massa' revolusi yang dilakukan oleh rakyat Iran tersebut.

Revolusi Islam Iran yang dikobarkan oleh Ayatollah Ruhollah Khomaeni dan para pengikutnya pada tanggal 11 February 1979 tersebut ternyata bentuk negara dari monarki-absolut menjadi republik dan menetapkan konstitusi 1979 sebagai konstitusi Republik Islam Iran. Presiden Iran dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Presiden pertama Islam Iran adalah Bani Sadr, seorang liberalis. Namun setelah terbukti bahwa dia malah bekerja sama dengan pihak luar negeri untuk menghancurkan pemerintahan Islam Iran, dia pun di pecat oleh Imam Khomeini. Kemudian, kembali diadakan pemilu dan terpilihlah Syahid Rajai yang kemudian terbunuh oleh teroris. Berikutnya diadakan pemilu kembali dan terpilihlah Sayyid Ali Khamenei sebagai presiden. Setelah empat tahun masa kepresidenannya selesai, rakyat sekali lagi memilih Sayyid Ali Khamenei untuk menjadi presiden periode kedua. Pada tahun 1989 Ayatullah Rohullah Imam Khomeini meninggal, yang kemudian Ayatullah Sayyid Ali Khamenei dipilih oleh Dewan Ahli (Majlis-e Khubregan), untuk menggantikan Imam Khomeni Sebagai rahbar (wali faqih) dan hingga saat ini beliau selalu terpilih kembali sebagai rahbar. Kemudian Ali Akbar Hashemi Rafsanjani terpilih sebagai presiden berikutnya.

Rafsanjani merupakan tokoh dari kubu konservatif pragmatis atau kubu tengah. Dia juga dianggap sebagai tokoh yang mampu menjembatani pertentangan antara kubu konservatif dan kubu reformis. Pada masa kepemimpinan Rafsanjani, Iran mulai mengalami banyak perubahan. Beberapa perubahan itu adalah Pembaruan ekonomi dengan membuka pintu pada investor asing, penggalakan swastanisasi, dan meningkatkan aktivitas ekspor-import mulai diterapkan oleh Rafsanjani. Pada era kepemimpinannya, banyak berpengaruh

diri bagi pihak asing termasuk Barat. Bahkan pada saat terjadi krisis dan perang teluk 1990-1991 Iran bersikap netral. Iran membiarkan pesawat-pesawat Irak mencari tempat perlindungan untuk menghindari gempuran pasukan koalisi PBB dan AS. Hanya saja sempat terjadi gejolak dengan pembaruan yang terjadi di Iran, bahkan Menteri Kebudayaan yang waktu itu dijabat oleh Mohammad Khatami sempat dipaksa mundur oleh kaum konservatif yang mendominasi parlemen, dia dituduh gagal membendung invasi kebudayaan Barat dengan membiarkan masuknya film, drama dan buku, yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Iran.³

Pada pemilu tahun 1997, Mohammad Khatami terpilih sebagai Presiden Iran. Munculnya presiden yang berasal dari kubu reformis, semakin membawa Iran pada era perubahan yang sedang diinginkan rakyat Iran saat itu. Proses reformasi yang dilakukan Rafsanjani, dilanjutkan oleh pemerintahan Khatami. Kaum konservatif juga menerima kekalahannya dalam pemilu, dan mengakui kemenangan kaum reformis. Apalagi itu merupakan hasil proses politik yang demokratis. Pada masa kepemimpinan Khatami, corak hubungan Iran dengan negara tetangganya di Teluk Persia dan dunia Barat mulai berubah. Segala prasangka ideologis dan politik mulai mencair. AS yang disebut-sebut sebagai musuh utama Iran mulai menawarkan perundingan tanpa syarat dengan Iran. Berkali-kali pula Khatami menekankan pentingnya dialog antarbudaya dan antaragama untuk membangun sikap saling pengertian dan mendorong penciptaan perdamaian dunia.

Pada era kepemimpinan Khatami, hubungan Iran dengan negara Barat (Perancis dan Jerman) mengalami kemajuan pesat. Namun hubungan dengan AS masih tetap seperti sedia kala. AS tetap menerapkan kebijakan politik panangkal ganda terhadap Irak dan Iran di kawasan Teluk dan masih mempertahankan berlakunya undang-undang D'Amato yang menjatuhkan sanksi ekonomi terbatas terhadap Iran. Namun dengan semakin kuatnya posisi Khatami, tidak hanya mempercepat proses terciptanya masyarakat Madani di Iran tetapi membantu terwujudnya stabilitas di kawasan Teluk Persia karena bisa makin tercapainya sikap saling pengertian antara Penguasa di Teheran dan negara-negara tetangga Iran, khususnya negara Arab Teluk. Pada pereode ini, Iran mencoba untuk melakukan normaliasi hubungan dengan Irak, dimana Presiden Khatami melakukan pertemuan dengan wakil presiden Tahai Yasin Ramadhan dari Irak pada saat KTT OPEC di Caracas, Venezuela, Oktober 2000.⁴ Setelah pertemuan tersebut, dilanjutkan dengan adanya kunjungan menteri perhubungan Irak Ahmed Murtadho ke Teheran untuk bertemu dengan petinggi-petinggi Iran. Kemudian pada masanya tersebut, Iran sukses menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan konferensi OKI yang dilaksanakan di Teheran, Desember 1997.5 Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada masa Khatami telah dilakukan beberapa upaya dalam rangka untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah. Politik luar negeri Iran sebenarnya mengalami perubahan sejak masa Rafsanjani yang kemudian diteruskan oleh Khatami. Khatami tidak hanya mencoba membuka

⁴ Musthafa Abd. Rahman, Iran Pasca Revolusi, Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan

hubungan diplomatik dengan negara-negara dikawasan Arab saja tapi juga membuka hubungan dengan negara-negara Eropa sebagaimana disebutkan diatas.

Kebijakan-kebijakan politik luar negeri Iran yang dilakukan oleh para pemimpin tersebut sebenarnya secara umum didasarkan pada strategi yang dianut pada pasca revolusi tahun 1979. Dimana platform politik luar negeri Iran antara lain adalah pertama, terjaminnya jalur ekspor minyak Iran baik secara keamanan, ekonomi, maupun politik. Kedua, mencegah masuknya pengaruh asing di Teluk Persia. Sedangkan keamanan negara-negara setempat harus dipikul bersama oleh negara-negara di Wilayah tersebut. Karena itu, Iran sangat mengecam kehadiran militer Barat pasca perang Teluk II di Teluk Persia. Ketiga, menjalin hubungan spiritual dan emosional dengan madzhab Syiah di negara-negara Arab dan Islam. Keempat, menganut politik antizionis, dan menolak kesepakatan damai Arab Kelima, mempertahankan status quo di Shatt Al Arab berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani Iran dan Irak pada tahun 1975 di Aljazair. Keenam, mempertahankan status quo di Teluk Persia, termasuk pendudukan Iran atas Pulau Abu Musa, Tumb Besar, dan Tumb Kecil. Karenanya, Iran menolak klaim Uni Emirat Arab (UEA) atas tiga pulau tersebut.6

Masa kepemimpinan Khatami sebagai Presiden Iran berakhir Juni 2005 bertepatan dengan terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad sebagai Presiden Iran yang baru. Ahmadinejad dikenal sebagai tokoh konservatif garis keras yang memegang teguh nilai-nilai revolusi. Ahmadinejad pernah menjadi Komandan Korp Garda

www.t.t. A Out. -- Tandard Dravinsi Ardahil

(Iran Barat Laut) selama perang Iran-Irak tahun 1980-1988. Dan kemudian pada tahun 2003 dipilih menjadi Wali Kota Teheran. Ketika masih menjabat sebagai Walikota Teheran, Ahmadinejad bersikap tegas terhadap warganya bahkan dibangun eskalator yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan menurut BBC News, sebagai Wali Kota Teheran ia menutup restoran-restoran cepat saji dan mengharuskan para pegawai balaikota untuk memelihara jenggot dan berbaju lengan panjang. Ia juga memerintahkan penurunan papan iklan yang memajang gambar David Beckam, selebriti Barat yang digunakan untuk mempromosikan produk di Iran sejak revolusi.

Dari penjelasan singkat diatas, bagaimanakah masa depan Iran berikutnya pasca terpilihnya Ahmadinejad sebagai Presiden. Dengan beberapa program yang akan dilakukan Iran termasuk pengaktifan kembali program nuklirnya. Akankah mempengaruhi huibungannya dengan negara-negara luar dan mempengaruhi stabilitas keamanan didalam negeri Iran serta kawasan Timur Tengah pada umumnya.

D. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis akan mencoba merumuskan sebuah permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Pengaruh Kemenangan Ahmadinejad dalam Pemilu 2005 Terhadap Stabilitas Keamanan di Timur Tengah?

⁷ Kompas, 25 Juni 2005.

E. Kerangka Teoritis

Untuk dapat menjawab persoalan yang akan diangkat maka dibutuhkanlah kerangka teoritis, agar dapat lebih mudah memahami persoalan diatas. Menurut Mochtar Mas'oed, teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya "melihat" atau "memperhatikan". Menurutnya, teori adalah suatu bentuk peryataan yang menjawab pertanyaan "mengapa". Artinya berteori adalah suatu upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. Karena berteori adalah pekerjaan untuk mendiskripsikan apa yang terjadi (deskripsi), mengapa itu terjadi (eksplanasi), dan meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian tersebut di masa yang akan datang (prediksi). Maka untuk mengetahui pengaruh terpilihnya Ahmadinejad sebagai presiden Iran bagi proses perdamaian di Timur Tengah, penulis akan mencoba menggunakan konsep Balance of Power.

Konsep Balance of Power

Ada beberapa macam arti dari konsep balance of power⁹ ini diantaranya adalah *Balance of Power sebagai distribusi*. Dimana perimbangan kekuatan berarti suatu distribusi sumber daya yang relatif seimbang di antara para partisipan. Konsep distribusi yang merata telah diterapkan untuk menyebut suatu perimbangan sederhana yang hanya melibatkan dua aktor maupun suatu perimbangan berganda yang melibatkan beberapa aktor. Sebaliknya, konsep ini juga telah diterapkan untuk menunjukkan adanya distribusi sumber daya yang

timpang, di mana satu aktor yang suka damai bisa menggertak satu aktor agresif yang mencoba mengubah distribusi itu.

Berdasarkan arti dari "Balance of Power" sebagai distribusi, yang mana hal ini dikontekskan dalam kasus stabilitas keamanan di Timuer Tengah maka ketika ada suatu aktor (negara) yang mempunyai kekuatan dominan, negara tersebut akan berusaha untuk mempertahankan atau memperluas kekuatan dominanya tersebut. Dalam hal ini Israel dilihat sebagai aktor yang berusaha untuk selalu memperluas dan mempertahankan kekuatan dominan yang dimilikinya. Menurut arti dari konsep ini, ketika ada suatu aktor yang berusaha menunjukkan dominasinya maka dibutuhkan aktor (negara) lain yang mampu "menggertak" aktor dominan yang agresif tersebut (Israel). Hal ini diperlukan untuk mengubah distribusi kekuatan dari aktor dominan tersebut. Oleh karena itu, Iran muncul sebagai negara yang dianggap mampu merubah distribusi sumber kekuatan tersebut. Maka usaha yang dilakukan Iran untuk merubah distribusi tersebut adalah dengan mengaktifkankembali program nuklirnya. dilakukan Iran dalam rangka untuk menggertak Israel yang dianggap telah berusaha untuk memperoleh dan mempertahankan dominasinyadi kawasan Timur Tengah. Maka dari itu apa yang dilakukan Iran untuk mengaktifkan kembali program nuklirnya adalah hal yang wajar, karena hal ini dilakukan untuk menciptakan "Balance of Power" di Timur Tengah.

"Balance of Power" sebagai kebijaksanaan nasional. Metafora perimbangan kekuatan juga dipakai untuk menggambarkan suatu jenis mencegah agar suatu koalisi tidak bisa memperoleh posisi dominan. Dalam hal ini paling tidak satu negara (aktor) utama harus berperan sebagai balancer. Aktor penyeimbang ini harus secara sadar bertindak untuk mencegah agar tidak satu negara pun bisa memperbesar diri terlalu jauh. Yaitu, ketika ada negara yang melakukan itu, si balancer segera bergabung dengan pihak koalisi yang defensif untuk menjamin bahwa si agresor akan bisa dikalahkan.

Ketika arti konsep "Balance of Power ini digunakan sebagai alat analisa untuk menjelaskan persoalan stabilitas keamana di Timur Tengah, maka aplikasinya adalah sebagai berikut, adanya konflik Arab-Israel telah menimbulkan dua kubu yang saling bertentangan, dimana kedua kubu tersebut membuat koalisinya masing-masing berdasarkan kepentingan nasional yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Koalisi pertama adalah koalisi offensif yang terdiri dari Israel dan Sekutunya yang memiliki kekuatan militer yang sangat modern dan canggih. Hal ini akan menyebabkan koalisi ini memperoleh posisi dominan serta mengancam koalisi defensif yang terdiri dari Palestina dan Bangsa Arab. Kekuatan koalisi ini jauh tertingal dari koalisi Israel dan Sekutunya. Jika hal ini tidak segera diatasi maka akan menyebabkan terganggunya "Balance of Power" di Timur Tengah. Untuk menjaga agar keseimbangan tersebut maka dibutuhkanlah balancer (Iran) untuk bergabung dengan koalisi defensif untuk menjamin bahwa si agresor (Israel dan Sekutunya) bisa dikalahkan. Iran berfungsi sebagai negara balancer atau sebagai aktor penyeimbang yang harus secara sadar bertindak untuk mencegah agar koalisi Israel tidak bisa memperbesar kemampuannya. Maka dari

of power di Timur Tengah. Oleh karenanya apa yang dilakukan Israel ini adalah sebagai respon dari pernyataan yang dikelurkan Ahmdnejad mengenai Israel.

F. Hipotesa

Dengan melihat permasalahan serta dikaitkan dengan kerangka teoritis yang telah ditetapkan, maka hipotesa dari permasalahan tersebut adalah bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah pasca terpilihnya Ahmadinejad sebagai Presiden Iran yang baru, akan meningkatkan ketegangan di kawasan sekitarnya diantaranya ketegangan dengan:

- 1. Negara-negara sesama kawasan Timur Tengah
- 2. Negara-negara di luar kawasan Timur Tengah (Barat dan AS)

G. Metode Pengumpulan data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan dengan Studi pustaka. Oleh karena itu data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, surat kabar, Internet dan sumber lain yang dianggap relevan sesuai dengan objek penelitian skripsi.

H. Jangkauan Penelitian

Pembatasan penulisan ini dimaksudkan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana

ditegaskannaya batas — batas kajian, maka akan menjadi pedoman dan mencegah kerancuan penelitian dan kekaburan wilayah persoalan. Karena isu yang menjadi focus skripsi ini tergolong isu kontemporer maka tulisan skripsi ini bersifat prediktif. Batasan masalah yang menjadi jangkauan penelitian dari skripsi ini adalah dari masa revolusi Islam Iran tahun 1979 hingga masa pemerintahan Ahmadinejad sebagai Presiden Iran yang baru tahun 2006.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam penulisan ilmiah dan dibagi dalam bab per bab, dengan pembagian pembahasan dalam wilayahnya sendiri namun saling berhubungan. Dengan tujuan mempermudah dalam melakukan interpretasi terhadap topik persoalan, maka skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari :

- Bab I : Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah,
 Pokok Permasalahan, Kerangka Teoritis, Hipotesa, Metode
 Pengumpulan Data, Jangkauan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Akan memberikan gambaran umum tentang dinamika peran serta keterlibatan Iran dalam menciptakan stabilitas keamanan di Timur Tengah dan dinamika pergantian kepemimpinan di Iran.
- Bab III : Akan memberikan gambaran umum mengenai stabilitas keamanan di

Bab IV : Akan menjelaskan pengaruh terpilihnya Ahmadinejad sebagai Presiden Iran terhadap stabilitas keamanan di Timur Tengah.

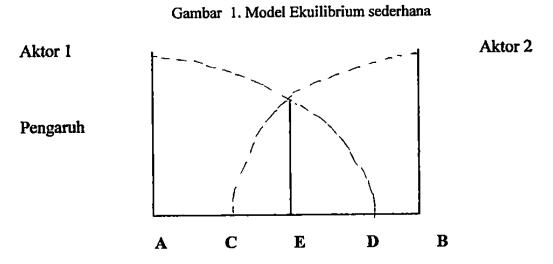
Bab V: Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan

adalah sebagai upaya agar tidak terjadi ketimpangan kekuatan antara kedua kubu koalisi tersebut.

"Balance of Power" sebagai ekuilibrium. Interpretasi ketiga tentang konsep ini lebih abstrak daripada dua yang pertama. Interpretasi ini melibatkan suatu model pada tingkat agregat yang bermaksud menjelaskan atau meramalkan tindakan-tindakan negara berdasar ciri-ciri sistematik. Ekuilibrium dipandang sebagai suatu hubungan di antara variable-variabel utama sistem itu (seperti distribusi sumber daya atau sikap dan kebijaksanaan negara-negara), yang begitu erat sehingga perubahan di satu variabel pasti akan menimbulkan perubahan di variabel lain. Ekuilibrium terpelihara hanya kalau variabel-variabel itu tidak berubah terlalu cepat atau terlalu banyak. Pendekatan ini berasumsi bahwa selama masih ada distribusi sumber daya yang cukup seimbang di antara lima atau lebih aktor, kebijaksanaan mereka akan tetap moderat, dan upaya oleh satu aktor untuk memperoleh posisi hegemoni akan bisa digagalkan oleh kekuatan pengimbangnya.

Letak terjadinya ekuilibrium itu adalah perbatasan di mana wilayah pengaruh para aktor itu bertemu. Akibat dari jarak geografis, kultural dan organisasional, pengaruh bisa menurun. Semakin jauh jarak geografis, kultural dan organisasional suatu tempat dari pusat produksi sumber daya, semakin merosot pula pengaruh itu. Gagasan ini terlukiskan dalam gambar 1. Para aktor bisa menerapkan pengaruh atas suatu wilayah sampai ia menemui kekuatan

mewakili wilayah pengaruh aktor pertama, BE adalah wilayah aktor kedua, dan CD adalah wilayah yang diperebutkan.



Sumber: R.F. Hopkin dan R. W. Mansbach, Structure and Process in International Politics (Harper & Row, 1973), hal.28.

Kalau suatu ekuilibrium unum terdapat di antara semua aktor, maka ketika pengaruh satu aktor meningkat atau merosot, titik ekuilibrium akan berpindah, kecuali terjadi perubahan-perubahan yang mengimbangi atau mengkompensasi di kalangan aktor-aktor lain. Dalam interpretasi tentang model "balance of power" ini, perpindahan keanggotaan koalisi dianggap harus terjadi karena negara-negara itu berusaha memelihara suatu ekuilibrium relatif. Prediksinya adalah bahwa kalau ada beberapa aktor besardengan sumber daya yang relatif seimbang, mereka akan berusaha mempertahankan distribusi relatif itu. Dalam pandangan ini suatu negara secara otomatis akan menyesuaikan diri kalau ada peningkatan kekuatan pada negara lain dalam sistem itu dengan cara meningkatkan sumber-sumber kekuatan mereka sendiri, dengan membentuk aliansi, atau dengan menentang

nunualoux apagan utau nadudambahan anatu nagan sualutunun

menghasilkan tambahan bagi wilayah pengaruhnya, akan secara efektif diimbangi oleh peningkatan kekuatan aktor-aktor lain, yang mungkin bisa meningkatkan kekuatan negara-negara lawan itu sehingga mereka bisa mengungguli dan menghentikan upaya ekspansi negara pertama itu.

Menurut konsep "balance of Power" sebagai ekuilibrium, jika hal ini digunakan dalam menjelaskan persoalan di Timur Tengah adapun aplikasi konsepnya adalah sebagai berikut. Setelah terjadinya perang Arab-Isreal, hal ini telah menimbulkan dua kubu yang saling bertentangan adapun kubu pertama adalah Isreal dan Sekutunya serta kubu kedua Iran serta Negara Arab. Setelah terpilihnya Ahmadinejad sebagai Presiden Iran, beliau mengeluarkan pernyataan keras untuk menghilangkan Israel dari peta dunia. Hal ini menurut Israel akan mengganggu dominasi Isreal yang pada akhirnya akan mengancam stabilitas keamanan di Timur Tengah. Dalam rangka untuk mempertahankan dominasinya tersbut maka Israel secara otomatis akan menyesuaikan diri untuk menghadapi tekanan dari Iran tersebut dengan meningkatkan sumber-sumber kekuatan Israel sendiri. Adapun upaya yang dilakukan oleh Israel untuk meningkatkan sumber kekuatannya tersebut adalah dengan melakukan lobi terhadap AS untuk memunculkan isu bahwa Iran akan memproduksi senjata nuklir yang akan mengancam kepentingan AS di Timur Tengah. Untuk menaggapi hal tersebut AS melakukan tekanan terhadap Iran agar tidak melakukan pengayaan uranium yang dapat dijadikan bahan untuk memproduksi senjata nuklir. Upaya yang dilakukan